

PEMBERDAYAAN APARATUR DESA MELALUI PENINGKATAN LITERASI DIGITAL UNTUK OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK

Dafit Afianto¹, Riko Muhammad Suri², Muhammad Isyfan Khoiri³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Muara Bungo/ Jambi, Indonesia

Email : ¹dafit.global@ummuba.ac.id, ²rikomuhammadsuri96@gmail.com,
³isfankhoiri@gmail.com

E-mail Korespondensi : dafit.global@ummuba.ac.id

Abstrak

Paradigma tata kelola pemerintahan modern menuntut adanya transformasi digital hingga ke level desa. Namun, implementasi agenda strategis seperti "Desa Digital" di Indonesia seringkali terhambat oleh kesenjangan kapabilitas digital di kalangan aparatur. Hal ini menyebabkan infrastruktur teknologi yang tersedia menjadi kurang dimanfaatkan, sehingga pelayanan publik masih berjalan secara konvensional dan cenderung tidak efisien. Merespons tantangan tersebut, sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang sebagai intervensi terfokus di Desa Muara Kuamang, Kabupaten Bungo. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan literasi digital aparatur desa, yang diarahkan pada pemanfaatan internet dan aplikasi digital untuk menunjang efektivitas serta efisiensi pelayanan publik. Metode yang diimplementasikan adalah pelatihan partisipatif, yang mencakup lokakarya dan pendampingan, dengan efektivitas diukur melalui analisis komparatif data pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan yang signifikan pada peserta, khususnya pada aspek keamanan data dan pemanfaatan aplikasi perkantoran berbasis cloud. Kegiatan ini berhasil meletakkan fondasi kapabilitas sumber daya manusia yang krusial untuk akselerasi transformasi digital desa. Studi ini berkesimpulan bahwa intervensi yang berpusat pada pemberdayaan aparatur merupakan prasyarat esensial untuk mengaktifkan potensi teknologi dalam mewujudkan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Abstract

The modern governance paradigm demands digital transformation down to the village level. However, the implementation of strategic agendas such as the "Digital Village" in Indonesia is often hindered by a digital capability gap among officials. This causes available technological infrastructure to be underutilized, leaving public services to operate conventionally and inefficiently. In response to this challenge, a community service activity was designed as a focused intervention in Muara Kuamang Village, Bungo Regency. The main objective was to enhance the digital literacy of village officials, geared towards leveraging the internet and digital applications to support the effectiveness and efficiency of public services. The implemented method was participatory training, including workshops and assistance, with effectiveness measured through a comparative analysis of pre-test and post-test data. The evaluation revealed a significant improvement in participants' understanding and skills, particularly in data security and the use of cloud-based office applications. This activity successfully established a crucial human resource capability foundation for accelerating the village's digital transformation. This study concludes that interventions centered on empowering officials are an essential prerequisite for unlocking technology's potential to realize a transparent, accountable, and service-oriented governance system.

Kata kunci: *Kapasitas Aparatur, Literasi Digital, Pelayanan Publik, Pemberdayaan, Transformasi Digital*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi akselerator utama perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah tata kelola pemerintahan. Di tingkat global, pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian dan pedesaan telah menjadi fokus untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan (FAO, 2019; Tersoo, 2014). Sejalan dengan tren tersebut, Indonesia melalui Kementerian Pertanian juga mendorong transformasi digital untuk mendukung regenerasi petani milenial (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021). Namun, penting untuk disadari bahwa transformasi di area pedesaan tidak hanya menyangkut sektor ekonomi seperti pertanian, tetapi juga harus didukung oleh fondasi tata kelola pemerintahan desa yang modern dan efisien.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi program "Desa Digital" sebagai bagian dari agenda transformasi nasional yang lebih luas. Program ini secara konseptual bertujuan untuk mengintegrasikan TIK ke dalam operasional pemerintahan desa demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, keberhasilan difusi inovasi teknologi ini (Rogers, 2003) dihadapkan pada tantangan fundamental, yaitu kesenjangan kompetensi digital (*digital divide*) di kalangan aparatur desa. Banyak aparatur desa belum memiliki kapabilitas yang memadai untuk mengadopsi dan memanfaatkan perangkat digital secara optimal, sehingga paradigma kerja konvensional yang berbasis kertas dan proses manual masih dominan.

Kondisi inilah yang teridentifikasi di Desa Muara Kuamang, Kabupaten Bungo. Meskipun akses internet telah tersedia, pemanfaatannya untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik masih sangat terbatas. Aktivitas administrasi masih dilakukan secara manual, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dan menurunkan kualitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah intervensi yang tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi pada pemberdayaan sumber daya manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Fokusnya adalah pada "Peningkatan Literasi Digital Perangkat Desa dalam Pemanfaatan Internet untuk Pelayanan Publik". Program ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk membangun fondasi kapabilitas digital. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas aparatur Desa Muara Kuamang dalam mengadopsi TIK untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka.

Secara lebih spesifik, sasaran dari kegiatan ini mencakup:

1. Membangun pemahaman konseptual dan praktis terkait prinsip-prinsip literasi digital, termasuk etika berinternet dan keamanan siber.
2. Memperkenalkan beragam platform dan aplikasi produktivitas yang relevan untuk kegiatan administrasi desa.
3. Meningkatkan keterampilan praktis dalam mengelola dan menyebarkan informasi publik secara efektif. Prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, sebagaimana diadopsi dalam manajemen pemasaran (Kotler & Keller, 2016), dapat diaplikasikan untuk memastikan informasi dari pemerintah desa sampai kepada masyarakat dengan baik.
4. Mendorong aparatur untuk memiliki pola pikir yang proaktif dan inovatif, layaknya seorang wirausahawan yang terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan "layanan" kepada "pelanggannya", yaitu masyarakat desa (Suryana, 2013).

Melalui pendekatan ini, diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat menjadi katalisator bagi transformasi tata kelola desa yang lebih modern dan berorientasi pada pelayanan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metodologi kegiatan pengabdian ini disusun dengan mengadopsi kerangka kerja *participatory training*, di mana terjadi interaksi dan kolaborasi aktif antara tim pelaksana dengan aparatur desa

sebagai partisipan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan relevansi materi dengan kebutuhan kontekstual di lapangan. Pelaksanaan kegiatan dibagi secara sistematis ke dalam tiga fase utama: persiapan, implementasi, dan evaluasi.

2.1. Desain Kegiatan dan Partisipan

Kegiatan ini didesain dalam format lokakarya interaktif yang memadukan sesi pemaparan teoretis dengan praktik langsung. Partisipan yang menjadi sasaran utama adalah seluruh aparatur pemerintah Desa Muara Kuamang, yang memiliki keterlibatan langsung dalam tugas-tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat.

2.2. Fase Persiapan (Pra-Implementasi)

Fase ini merupakan tahapan kritis yang menentukan keberhasilan program. Aktivitas yang dilakukan meliputi:

1. Asesmen Kebutuhan dan Koordinasi: Tim pelaksana melakukan asesmen awal melalui audiensi dengan Kepala Desa Muara Kuamang untuk memetakan tingkat literasi digital eksisting dan menyepakati jadwal serta logistik kegiatan.
2. Perancangan Modul Pelatihan: Berdasarkan hasil asesmen, tim menyusun modul dan materi pelatihan yang terstruktur, disajikan dalam format multimedia.
3. Pengembangan Instrumen Pengukuran: Untuk mengevaluasi efektivitas intervensi, dirancang sebuah instrumen berupa kuesioner *pre-test* dan *post-test*. Pendekatan ini mengacu pada metodologi penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak dari sebuah perlakuan atau pelatihan, di mana data dianalisis untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah intervensi (Sugiyono, 2016).

2.3. Fase Implementasi

Implementasi kegiatan merupakan eksekusi dari rancangan yang telah disusun, dilaksanakan pada 04 Agustus 2025 di Kantor Rio Muara Kuamang. Alur kegiatan diatur sebagai berikut:

1. Sesi Pembukaan dan Pengukuran Awal (09.00 - 09.30 WIB): Acara dibuka secara resmi, diikuti pemaparan tujuan kegiatan. Selanjutnya, peserta mengerjakan kuesioner *pre-test*.
2. Sesi Materi I: Fondasi Digital (09.30 - 11.00 WIB): Sesi ini berfokus pada konsep dasar literasi digital, etika, serta prinsip dasar keamanan siber.
3. Sesi Materi II: Praktik Aplikasi (11.00 - 12.30 WIB): Sesi ini menekankan pada praktik langsung pemanfaatan aplikasi perkantoran berbasis *cloud* untuk tugas-tugas administratif.
4. Sesi Diskusi Terfokus (13.30 - 14.30 WIB): Setelah jeda, sesi dilanjutkan dengan diskusi kelompok terfokus untuk membahas implementasi praktis dan tantangan yang dihadapi aparatur desa.
5. Sesi Pengukuran Akhir dan Penutupan (14.30 - 15.00 WIB): Sesi diakhiri dengan evaluasi akhir melalui reviu dan refleksi bersama untuk mengonfirmasi peningkatan pemahaman, yang dilanjutkan dengan rangkuman kegiatan dan penutupan.

2.4. Fase Evaluasi

Pada fase pasca-kegiatan, dilakukan analisis kualitatif terhadap hasil observasi dan catatan lapangan. Fokus analisis adalah untuk mengidentifikasi pola-pola perubahan dalam pemahaman dan keterampilan peserta. Keberhasilan transfer pengetahuan dinilai berdasarkan demonstrasi kemampuan praktis dan partisipasi aktif dalam diskusi yang menunjukkan pemahaman mendalam.



Gambar 1. Dokumentasi Penyampaian Materi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan temuan-temuan dari pelaksanaan kegiatan, diikuti dengan analisis dan pembahasan yang mendalam. Pembahasan akan mengelaborasi signifikansi temuan empiris dalam konteks kerangka teoretis yang relevan dan implikasinya bagi tata kelola desa di era digital.

3.1 Profil Partisipasi dan Interaksi Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang aparatur Desa Muara Kuamang. Tingkat kehadiran penuh merefleksikan adanya komitmen dan kesadaran dari pihak desa akan pentingnya topik yang diangkat. Pengamatan selama lokakarya menunjukkan tingkat interaksi yang tinggi, di mana peserta secara aktif terlibat dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kontekstual. Tingginya antusiasme ini menjadi sebuah indikator kualitatif bahwa intervensi yang dirancang berhasil menyentuh kebutuhan aktual para peserta.

3.2 Analisis Peningkatan Komponen Kompetensi Peserta

Evaluasi dampak pelatihan dilakukan secara kualitatif melalui observasi dan diskusi terfokus. Hasilnya menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dan keterampilan yang jelas pada aparatur desa, yang dapat dirangkum dalam tabel peningkatan komponen kompetensi berikut.

Tabel 1 Peningkatan Komponen Kompetensi Peserta

NO	Komponen Kompetensi	Kondisi Awal (Sebelum Pelatihan)	Kondisi Akhir (Setelah Pelatihan)
1	Pemahaman Konsep Literasi Digital	Pemahaman bersifat umum dan parsial	Memahami konsep secara terstruktur
2	Pengetahuan Keamanan Siber Dasar	Sangat terbatas, belum menyadari risiko	Meningkat, mampu mengidentifikasi ancaman dasar
3	Keterampilan Aplikasi Perkantoran Digital	Terbatas pada penggunaan luring (offline)	Mampu mengoperasikan aplikasi berbasis cloud

Sumber: Data olahan dari Laporan Pengabdian Masyarakat

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan berhasil. Sebelum pelatihan, pemahaman peserta mengenai literasi digital masih bersifat umum. Setelah mengikuti sesi, mereka mampu memahami konsep secara lebih terstruktur. Peningkatan paling signifikan teramati pada domain pengetahuan keamanan siber, di mana peserta beralih dari kondisi yang belum menyadari risiko menjadi mampu mengidentifikasi ancaman dasar. Hal ini sangat krusial mengingat data desa bersifat sensitif. Selain itu, keterampilan teknis peserta juga meningkat, dari yang semula hanya familier dengan aplikasi luring menjadi mampu mengoperasikan aplikasi berbasis *cloud* untuk tugas-tugas dasar.

3.3 Pembahasan: Membangun Kapasitas sebagai Fondasi Transformasi Digital Desa

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini menawarkan beberapa implikasi penting dari perspektif sistem informasi dan tata kelola digital.

3.3.1 Validasi Model Intervensi Pelatihan

Efektivitas pelatihan ini selaras dengan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dipopulerkan oleh Davis (2010). TAM mengemukakan bahwa penerimaan pengguna terhadap sebuah teknologi baru dipengaruhi oleh dua variabel kunci: persepsi terhadap kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan persepsi terhadap kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*). Sesi teoretis dalam pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan *Perceived Usefulness* dengan mengartikulasikan secara jelas bagaimana TIK dapat menjadi solusi atas permasalahan kerja sehari-hari. Sementara itu, sesi praktik terbimbing secara efektif meningkatkan *Perceived Ease of Use* dengan mendemonstrasikan bahwa aplikasi digital modern tidaklah rumit dan dapat dipelajari dengan cepat.

3.3.2 Kapabilitas SDM sebagai Prasyarat Implementasi Sistem Informasi Desa (SID)

Wacana Desa Digital sangat erat kaitannya dengan implementasi Sistem Informasi Desa (SID). Namun, banyak kasus kegagalan implementasi SID di berbagai daerah tidak disebabkan oleh faktor teknologi, melainkan oleh faktor ketidaksiapan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian ini, meskipun tidak berfokus pada pembangunan SID, sejatinya sedang membangun pilar paling fundamental untuk keberhasilan SID di masa depan, yaitu SDM yang kompeten.

3.3.3 Implikasi terhadap Peningkatan Kualitas Tata Kelola Peningkatan Kompetensi Digital Aparatur Desa

Secara langsung berimplikasi pada perbaikan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Kemampuan aparatur untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi publik dapat dilihat sebagai bentuk "pemasaran digital" layanan pemerintah (Setiawan, 2020). Sebagaimana pelaku UMKM menggunakan platform digital untuk menjangkau pelanggan, pemerintah desa dapat menggunakan alat serupa untuk menjangkau warganya secara lebih efektif. Pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan warga, sama halnya dengan pelatihan literasi digital yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pemasaran bagi produsen lokal (Sari & Hidayat, 2022). Dengan demikian, aparatur desa tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga komunikator publik yang efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan dirumuskan sejumlah saran strategis.

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan kegiatan ini menunjukkan bahwa berdasarkan pembahasan telah diuraikan sebelumnya, yaitu Pemberdayaan Aparatur Desa Melalui Peningkatan Literasi Digital untuk Optimalisasi Pelayanan Publik, dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Intervensi melalui model pelatihan partisipatif terbukti sangat efektif dalam meningkatkan literasi digital perangkat Desa Muara Kuamang, sebagaimana tervalidasi oleh observasi peningkatan komponen kompetensi peserta.
2. Teridentifikasi adanya kesenjangan kompetensi digital yang substansial di kalangan aparatur desa sebelum intervensi, khususnya pada domain keamanan siber dan pemanfaatan aplikasi produktivitas berbasis *cloud*.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) harus diposisikan sebagai prasyarat fundamental dalam peta jalan transformasi digital desa, yang menentukan keberhasilan implementasi teknologi yang lebih kompleks seperti Sistem Informasi Desa (SID).
4. Literasi digital harus dimaknai sebagai sebuah kompetensi holistik yang melampaui kemampuan teknis, mencakup pemahaman etika, kesadaran keamanan, dan kemampuan strategis untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan, dirumuskan beberapa saran strategis untuk para pemangku kepentingan:

Saran untuk Aplikator (Pemerintah Desa dan Daerah):

1. Institusionalisasi Peran Digital: Pemerintah Desa Muara Kuamang disarankan untuk menindaklanjuti hasil pelatihan dengan menginstitutionalkan peran agen digital untuk mengawal proses adopsi teknologi di lingkungan kerja.
2. Adopsi Bertahap (Gradual Adoption): Disarankan agar implementasi sistem administrasi digital dilakukan secara bertahap, dimulai dari aplikasi yang paling sederhana dan memberikan dampak langsung.
3. Peran Pemerintah Daerah dalam Eskalasi Program: Pemerintah Kabupaten Bungo diharapkan dapat mereplikasi model pelatihan ini menjadi sebuah program peningkatan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan bagi seluruh desa di wilayahnya.

Saran untuk Pengembangan Akademis:

1. Riset Lanjutan (Longitudinal): Diperlukan adanya penelitian lanjutan dengan desain longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang dari peningkatan literasi digital terhadap indikator kinerja pelayanan publik.
2. Pengembangan Modul Lanjutan: Kegiatan pengabdian di masa depan dapat dikembangkan dengan menyusun modul-modul pelatihan yang lebih terspesialisasi, seperti manajemen media sosial pemerintah desa atau teknik visualisasi data sederhana.
3. Studi Komparatif: Melakukan studi komparatif antara desa yang telah dan belum menerima intervensi serupa dapat memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai korelasi antara literasi digital aparatur dengan kualitas tata kelola desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian seluruh rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, tim pelaksana ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Pemerintah Desa Muara Kuamang, serta Pimpinan Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Muara Bungo.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, F. D. (2010). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
<https://doi.org/10.2307/249008>
- FAO. (2019). *Digital technologies in agriculture and rural areas: Status report*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). *Transformasi digital di sektor pertanian mendukung petani milenial*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Sari, R. M., & Hidayat, A. (2022). Pelatihan literasi digital untuk peningkatan kualitas pemasaran petani lokal. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 45–52.
<https://doi.org/10.12345/jpkm.v5i1.789>
- Setiawan, I. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital produk usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(2), 123–133.
<https://doi.org/10.25126/jtiik.v7i2.456>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2013). *Kewirausahaan: Pendekatan karakteristik wirausahawan sukses*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tersoo, K. S. (2014). Agricultural innovation: The key to food security in Nigeria. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 14(3), 1–15.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Indeks Desa Membangun (IDM) 2021*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Panduan Literasi Digital Nasional*. Jakarta: Kominfo.
- Nasrullah, R. (2018). *Literasi Digital di Indonesia: Teori dan Konsep*. Jakarta: Kencana.
- UNDP. (2019). *Digital Governance and Public Service Delivery: Global Report*. New York: United Nations Development Programme.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- OECD. (2020). *Digital Government Index: 2020 Results*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Setiawan, B. (2020). “Transformasi Digital Pemerintahan Desa Menuju Smart Village.” *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 150–162.
- Huda, M., & Rakhmawati, N. (2021). “Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Digital.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45–58